

Menelaah Lebih Dekat “*Post Factual/Post Truth Politics*, Studi Kasus Brexit” (Analisis Resensi Media)

Eko Wahyono

Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang
Email: ekowahyono10@gmail.com

Rizka Amalia

Prodi Ilmu Komunikasi IPB
Email: amalrizka@gmail.com

Ikma Citra Ranteallo

Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana
Email: ikmacitra@outlook.com

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah lebih jauh video yang berjudul “what is the truth about post-factual politics?” mengenai kasus di Amerika terkait Trump dan di Inggris terkait Brexit. Fenomena post truth/post factual juga terjadi di Indonesia sebagaimana terlihat pada pertarungan politik yang dialami Ahok pada Pilkada DKI yang lalu. Melalui pendekatan pemikiran Michel Foucault mengenai post truth dengan logika asertif, media massa dikonstruksikan bagi pihak yang berkepentingan dan mengabaikan realitas yang sesungguhnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa media baru atau new media ternyata mampu menebar berbagai wacana mulai dari memengaruhi pemikiran, perilaku masyarakat hingga ideologi yang dianut oleh suatu masyarakat.

Kata kunci: Post factual, post truth, new media

ABSTRACT

This research further examines the video entitled “what is the truth about post-factual politics?” about the case in the United States related to Trump and in the UK related to Brexit. The phenomenon of Post truth/post factual also occurs in Indonesia as seen in the political struggle experienced by Ahok in the governor election (DKI Jakarta). Through Michel Foucault's approach to post truth with assertive logic, the mass media is constructed for the interested parties and ignores the real reality. The conclusion of this study indicates that new media was able to spread various discourses ranging from influencing the way of thoughts, behavior of society to the ideology adopted by a society.

Keywords: Post factual, post truth, new media

PENDAHULUAN

Di era globalisasi kehadiran media baru tidak dapat dielakkan lagi, media baru seperti video menarik perhatian khalayak banyak, begitu juga dengan fenomena *post factual politics* yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini. Sebut saja video yang berjudul “what is the truth about post-factual politics?” (https://www.youtube.com/watch?v=B_g1hzz06do), menjelaskan tentang *post-factual politics* yang menggambarkan fenomena seperti terpilihnya Donald Trump dan Brexit. Beberapa fenomena *post-factual politics* tersebut kemudian dianalisis oleh beberapa

pengamat seperti Prof. Frank Furedi, Josh Lowe, Prof. Neena Modi, dan Dr. Adam Rutherford. Hasil kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat maupun referendum Brexit memicu bangkitnya '*post-truth politics*', hal tersebut dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa penting di tahun 2016 sebagai tanda dimulainya '*post-factual era*'.

Para pemikir intelektual khususnya di bidang ekonomi dunia dan sains memperingatkan konsekuensi Brexit, tetapi 52%, namun hal ini diabaikan oleh masyarakat, mereka beranggapan bahwa mereka memilih dengan hati. Jika masyarakat paham apa yang dinasihatkan oleh para ahli maka mereka akan mengikutinya sehingga tidak ada celah untuk perdebatan. Perdebatan pada acara *Battle of Ideas* memuncak ketika Professor Frank Furedi menyatakan secara tegas bahwa '*fact checking*' adalah satu jalan untuk menghindari konfrontasi antara ide dan nilai.

Secara sosiologis, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi keputusan publik. Melalui fakta empirik dan positivistik menyatakan bahwa kebenaran dan generalisasi dapat diperoleh dari relasi sebab-akibat dari hubungan antar variabel-variabel. Publik berpendapat bahwa kondisi saat Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa justru merugikan karena adanya kesempatan bagi para imigran untuk masuk ke Inggris dan adanya iuran yang cukup besar harus dibayarkan. Bagi para penganut positivistik atau bahkan masyarakat yang dianggap tidak memiliki *stock of knowledge* (muatan pengetahuan), akan memilih Inggris keluar dari Uni Eropa karena adanya dampak-dampak yang merugikan yang seharusnya dihindari dari hal itu. Sementara itu, pendapat para pakar yang saling bertentangan dan kompleks justru menyulitkan publik untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat, sehingga muncullah keraguan atas pakar dan ahli. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada sumber keputusan yang dianggap dapat mewakili aspirasi publik, yang ada hanya opini-opini yang dikonstruksi dan disebar di berbagai media sosial. Hal ini kemudian memungkinkan adanya Teori Konspirasi dimana menurut Latour (2004), teori-teori Konspirasi merupakan sebuah perubahan bentuk *absurd* dari argumentasi-argumentasi, namun tetap menjadi semacam senjata untuk menghadapi berbagai perbincangan atau debat. Demikian halnya dengan keraguan publik terhadap para pakar terkait Brexit dan kemenangan Trump, yang tidak terlepas dari teori-teori konspirasi tersebut.

Adanya fenomena Brexit dan kemenangan Trump perlu dianalisis lebih mendalam mengenai sesuatu yang dikatakan dan dianggap sebagai fakta atau bukan fakta serta darimana fakta tersebut dibentuk dan diperoleh, sehingga dikenal adanya budaya *Fact checking*. Zelizer (2004) membedakan *truth*, *reality*, dan *fact*, serta *construction*, *subjectivity*, dan *relativity*. *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (2003) membedakan definisi-definisi tersebut. *Truth: the quality of being true* dimana *True* merupakan kebenaran yang menggambarkan sesuatu secara akurat atau tepat. *Reality: the state of things as they are, rather than as they are imagined to be* dimana merupakan suatu kondisi atau pernyataan-pernyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana suatu kondisi atau pernyataan-pernyataan itu dibayangkan. *Fact: something which is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists, or about which there is*

information yaitu merupakan sesuatu yang diketahui terjadi atau ada, khususnya sesuatu yang dibuktikan ada atau memiliki keterangan.

Jika *truth*, *reality* dan *fact* dianalisa berdasarkan *construction*, *subjectivity*, dan *relativity* maka konstruktivisme menyatakan bahwa yang disebut kebenaran, fakta dan realitas merupakan sesuatu yang dihasilkan dari konstruksi sosial, yang mengarah pada kesepakatan sosial. Subyektivisme berpendapat bahwa kebenaran, fakta dan realitas merupakan hasil dari pikiran manusia, yang berwujud persepsi, keyakinan dan perasaan. Sementara itu, relativisme memandang kebenaran, fakta dan realitas tidak berada pada satupun kondisi yang disebut benar, nyata, dan sebagaimana adanya. Relativisme meyakini bahwa setiap konteks memiliki pemahaman dan legitimasi masing-masing, dan cenderung berbeda, terhadap mana yang disebut kebenaran, fakta dan realitas. Oleh karena itu, dalam pandangan relativisme maka tidak ada yang benar dan tidak ada yang keliru.

Pada zaman sekarang ini, masyarakat yang hidup di dunia *post-factual* yang mana tidak ada seorang pun yang percaya pada fakta. Dunia *post-factual* meliputi ketiadaan fakta-fakta dan keunggulan persepsi-persepsi subyektif, yang disebut Lippmann sebagai dunia yang lumpuh akibat relativitas. Dunia *post-factual* juga muncul setelah kemerosotan agama dan pengikisan kekuatan tradisi, sebagai dampak dari bahaya ketidakpastian dunia. Menurut Bybee (1999), relativitas *truth* (kebenaran) berkaitan dengan konteks otoritas dalam menentukan apa yang akan disebut kebenaran. Pengujian kebenaran menghasilkan konsekuensi bagi orang-orang dan kebenaran tersebut dapat direpresentasikan atau dinilai oleh orang-orang yang mengalami dan berada dalam konsekuensi-konsekuensi tersebut. Menurut Bybee (1999), *science* (ilmu) adalah cara memahami dunia dan tidak terpisahkan dari dunia. Ilmu merupakan hasil dari berkembangnya kepentingan-kepentingan komunitas manusia yang memproduksinya, beserta nilai-nilai pengetahuan di dalamnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dapat hilang atau bahkan "dapat dihilangkan" oleh penguasa atau dapat digantikan oleh ilmu lain dimana siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat menentukan sebuah ilmu itu layak untuk dipakai atau tidak. Hal ini dibahas oleh Foucault dalam bukunya *Archaeology of Knowledge* (1980)

METODE PENELITIAN

Wacana dalam media merupakan suatu ruang yang mampu merubah perspektif audiens lewat tawaran beragam cara pandang yang berbedaterhadaprealitas. Media massa dalam bentuk medium apapun, termasuk di dalamnya kehadiran media baru, yang memiliki fungsi cultural transmission(Wright, Charles R.1988), Roger Fowler (1977) mendefinisikan wacana sebagai"komunikasi lisan atau tulisan yang dilihatlewat titik pandang kepercayaan, nilai, dan kategori yang termaktub di dalamnya"; kepercayaan di sini mewakili pandangan atas dunia; sebertukupengorganisasian atau representasi dari pengalaman (Eriyanto, 2012). Sementara Foucault (1972), menjelaskan wacana sebagai "bidang semua pernyataan (statement), yang sering

kali merupakan bentuk individualisasi dari kelompok pernyataan, dan kerap kalimenjadi praktek regulatif ditinjau dari sejumlah pernyataan yang ada”. Adapun J.S Badudu (2000) membagi dua pengertian dari wacana; pertama, sebagai rentetan kalimat yang saling mengait, menghubungkan berbagai bentuk proposisi, membentuk kesatuan, sehingga mewujudkan makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Kedua, wacanasebagai kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi, atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koheresi berikut kohesi yang tinggi dan berkesinambungan, pun mempunyai awal dan akhir yang nyata, juga disampaikan secara lisan ataupun tertulis, dalam penelitian ini digunakan sebagai analisis dalam menelaahvideo yang berjudul “what is the truth about post-factual politics?” mengenai kasus di Amerika terkait Trump dan Inggris terkait Brexit, di Indonesia juga terjadi fenomena post truth / post factual pada pertarungan politik Jakarta tentang “Ahok”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isu-Isu Terkait *Post Truth/Post Factual*

Secara sosiologis, apa yang telah dipaparkan oleh pemateri dalam video “*What is the truth about post-factual politics?*” merupakan fenomena untuk membongkar sebuah teknologi media yang dimanfaatkan hanya untuk memuaskan “syahwat politik” pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Didalamnya termasuk mengkonstruksi kebohongan sebagai pesan kebenaran sehingga kebenaran mengalami defisit diantara kepongungan ego dan kepentingan politik. Dari fenomena ini, kemudian munculah sebuah era dimana kebohongan menjadi sebuah dogma yang “diamini” oleh masyarakat awam.

Masyarakat di berbagai belahan negara sedang mengalamifase *post truth*” yaitu sebuah fase dimana masyarakat mengabaikan etika pendapat, mengedepankan berita hoax dan fitnah seperti kasus Brexit dan terpilihnya Trump. Hal tersebut bertujuan untuk mencampuradukan dan “memanasi” emosi khalayak dan menggiring sebuah kebenaran dalam menyampaikan informasi dan gagasan. Era ini cenderung menggiring kebenaran dengan selera yang diinginkan meskipun pada dasarnya hal ini tak mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya.

Masyarakat sudah diselubungi antitesis dari sebuah pengetahuan dan kebenaran yang hakiki. Ilmu pengetahuan yang berusaha memvalidasi atau memferifikasi sebuah “isu *hoax*” hanya akan dianggap sebagai niatan konspirasi. Masyarakat sudah tidak mempercayai akan sebuah pengetahuan yang bersifat empiris dan objektif. Akan tetapi lebih percaya pada “*broadcast*” yang disampaikan oleh pihak lain yang memiliki paham yang sama. Kondisi *post truth* menjadi ancaman yang besar bagi tatanan moral. *Post truth* dapat menjadi sebuah “tsunami” dimana terdapat isu-isu yang merusak pola berfikir dan pola nilai masyarakat. Dimulai dari media maya yang berujung pada perusakan sendi-sendi realistas kehidupan nyata masyarakat.

Ghufron (2017) menyatakan bahwa industri media pada saat ini sedang mengalami refeodalisasi ruang public dimana terdapat logika ekonomi dan politik yang dimasukkan dalam sendi-sendi kesadaran masyarakat sehingga memperlemah kekuatan masyarakat dalam ruang

public. Karl Marx melihat bahwa mereka yang menguasai basis materi akan menguasai gagasan dalam sebuah zaman (Ritzer 2011). Di era kontemporer ini, mereka yang akan menguasai modal, politik dan media maka akan menguasai gagasan di zaman ini. Terdapat sebuah mekanisme yang lebih kompleks dan halus yang membuat orang-orang melakukan yang dikehendaki oleh pemilik media.

3.2 Pandangan Terkait *Post Truth/Post Factual*

Dr. Adam Rutherford kurang yakin bahwa masyarakat pada era sekarang berada pada era *post-truth*. Pandangan Dr. Adam Rutherford ini didasari atas latar belakangnya sebagai ilmuwan dimana seorang ilmuwan harus selalu meragukan sebuah kebenaran. Oleh karena itu, Dr. Adam Rutherford menganggap bahwa Trump telah menyatakan kebohongan-kebohongan secara terus menerus demi kepentingan politiknya. Ilmu pengetahuan dan politik memang merupakan sesuatu yang berbeda. Pada ilmu pengetahuan kebenaran diperoleh berdasarkan landasan metode yang digunakan sehingga diperoleh bukti-bukti yang mendukung kebenaran yang dimaksud. Sementara politik, kebenaran hanya dipersepsikan tanpa adanya bukti yang mendukungnya. Walaupun begitu, banyak orang yang lebih percaya pada orasi politikus daripada penjelasan para pakar karena masyarakat mengambil keputusan tanpa berfikir rasional melainkan menggunakan emosional.

Prof. Frank Furedi tidak setuju atas adanya *post factual* karena fakta mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung seseorang yang menafsirkannya. Sementara akhir-akhir ini elit yang mempunyai media massa lebih dipercaya oleh masyarakat daripada para ahli. Para elit yang mempunyai media massa menyebarkan pandangan mereka tentang fakta menggunakan sedikit sentuhan sains melalui media massa sehingga masyarakat terpengaruh atas hal itu.

Prof. Neena Modi kurang setuju dengan adanya *post factual* karena dengan istilah tersebut hanya menguntungkan sebagian orang yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Kondisi *post factual* hanya dipenuhi dengan keadaan-keadaan dan isu-isu yang didasari atas adanya emosi serta adanya penolakan yang kuat atas bukti-bukti yang ada. Pada era *post factual* ini masyarakat tidak lagi percaya dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh pakar melainkan lebih percaya pada pernyataan *factual* yang salah. Pernyataan *factual* yang salah dari kepentingan tersebut diterima oleh masyarakat dengan menggunakan emosi tanpa menggunakan logika. Dalam bidang politik, pernyataan-pernyataan politik selalu memiliki daya tarik emosi dimana dalam hal ini disebut sebagai ideologi. Dalam ideologi ini kadang dilupakan aspek kebaikan dan keburukannya. Oleh karena itu, kondisi *post factual* bisa membahayakan bagi keadaan masyarakat di masa yang akan datang. Maka dari itu, masyarakat perlu memperhatikan politisi yang mempunyai integritas dan perilaku yang baik.

Josh Lowe menyatakan bahwa masyarakat hidup di era *factual* ini, dimana masyarakat tidak menerima pernyataan-pernyataan politik tanpa didasari atas fakta. Oleh karena itu, politisi selalu membuat pernyataan sesuai fakta yang menarik dan dapat mencapai tujuannya. Jika politisi tidak mempunyai bahan orasi sesuai fakta maka para politisi menggunakan beberapa bahan yang

mendekati kebenaran. Para politisi menyebarkan orasi yang sesuai tujuannya melalui media-media yang mempunyai tingkat kepercayaan tinggi menurut masyarakat. Dalam kondisi *post factual*, politisi hanya mengambil fakta-fakta yang kemudian diinterpretasi sesuai dengan cara berfikir, emosi, budaya dan struktur masyarakat.

Setelah melihat dan mendiskusikan video yang berjudul “*What is the truth about post-factual politics?*” dengan anggota kelompok maka kami memandang bahwa fenomena *post truth / post factual* merupakan hal sedang hangat terjadi di berbagai Negara. Lain halnya di Amerika terkait Trump dan Inggris terkait Brexit, di Indonesia juga terjadi fenomena *post truth / post factual* pada pertarungan politik Jakarta tentang “Ahok”. Berbagai media yaitu youtube, facebook, whatsapp, instagram, twitter dan media lainnya digunakan untuk menebar berita-berita factual yang belum tentu kebenarannya. Berita-berita tersebut diterima oleh masyarakat dengan penuh emosi karena menyangkut ideologi dan agama sehingga beberapa bukti dan kebenaran yang disampaikan oleh pakar dan ahli agama dan ilmu pengetahuan tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Masyarakat secara tidak sadar sudah larut dalam berita-berita factual yang dipenuhi oleh kepentingan politik sebagian *stakeholder* yang pada dasarnya memberikan keuntungan pada *stakeholder* yang bersangkutan.

Sebagai mahasiswa dan kaum intelektual muda, fenomena dan istilah *post truth / post factual* tidak seharusnya serta merta dipercaya karena kebenaran dan fakta yang disampaikan oleh politisi dan media belum tentu benar. Kebenaran dari suatu fakta harus dicek melalui berbagai pandangan ontology, epistemologi dan metodologi yang mendasarinya. Sebagai mahasiswa juga mempunyai pandangan yang luas dan holistik serta menghindari penggunaan emosi dalam menafsirkan suatu fakta yang disampaikan dan dinilai oleh beberapa orang saja.

3.3 Keterkaitan *Post Truth/Post Factual* dengan Sains

Filsafat sains selalu berupaya untuk mempertanyakan suatu hal secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat sains selalu mencari kebenaran dan pengetahuan secara terus-menerus. Sementara itu, dalam kasus “*post truth*” ini semua pihak merasa bahwa pendapatnya sendirilah yang paling benar. Seperti pada kasus Donald Trump apapun yang dia katakan meskipun tidak berdasarkan pada fakta dan data namun banyak juga pihak yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Isu-isu yang dinyatakan dalam “*post-factual politics*” masih bersifat sebagai pengetahuan “*knowledge*” yang disebarkan secara masal yang belum terbukti kebenarannya. Pengetahuan adalah semua gagasan, pemikiran dan pemahaman yang dimiliki manusia mengenai dunia dan segala isinya. Kebenaran dari pengetahuan harus dicari melalui pencarian metode serta sistematika tertentu dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh *scientist*.

Dalam kasus *fact-checking* permainan kata digunakan hanya untuk mempertanyakan pihak lain yang memiliki perbedaan pandangan, serta sebagai upaya untuk melegitimasi pandangannya terhadap pandangan lain. Hal ini berbeda dengan ilmu pengetahuan yang memiliki metode logis

dan koheren sebagai dasar pembenaran (justifikasi) pendapatnya. Memiliki sistematis argument berfikir, dan bersifat pamrih (prinsip ilmu demi ilmu).

Isu yang dibahas dalam diskusi ini sangat factual, berlangsung pada kehidupan sehari-hari dan tidak memiliki metode ilmiah. Siapapun bisa membahas isu yang sedang hangat tersebut, sehingga isu dan bahasanya menjadi ambigu dan kabur. Hal ini sangat berbeda dengan pengetahuan ilmiah (falsafah sains) yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, memperluas pemahaman/pengetahuan, diskripsi, interpretasi dan kontrol. Dalam mengambil data (epistemology) pun data harus memiliki metode yang jelas (kualitatif-kuantitatif). Dengan demikian bahasa dan data yang disampaikan bersifat lugas/tepat, verifikasi/falsifikasi.

3.4 Gagasan dan Ide Terkait *Post Truth/Post Factual*

Dalam fenomena *post-truth* yang terjadi pada akhir-akhir ini memiliki pandangan yang berbeda dengan filsafat sains. Dimana isu-isu yang dipandang secara *post-truth* berkembang dan terus “menggelinging” bagaikan bola salju tanpa arah dan tujuan. Isu yang ada selalu berbasiskan pada kepentingan elit dan sesuai dengan selera masyarakat umum. “Tidak ada bahasa dalam dirinya sendiri, juga tidak ada universalitas dalam bahasa, bahasa adalah kumpulan dialek, ujaran, ungkapan populer (slang) dan bahasa khusus, tidak ada pula juru bicara” ideal dalam komunikasi, kecuali pada komunikasi linguistik yang homogeni. Tidak ada bahasa ibu, kecuali perampasan kekuasaan oleh wacana dominan dalam suatu keberagaman politik” (Gilles Deleuze dan Felix Guattari, dalam Lubis, 2015). Isu-isu dalam *post truth* dibahas ini selalu dalam kondisi diskursus antara fakta kebenaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Foucault yang memperhatikan tentang formasi wacana dan peran wacana dalam pembentukan kesadaran masyarakat. Foucault mengemukakan mengenai “*decentring subjek*” dan hubungan antara diskursus dengan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat dan produksi diskursus selalu dikontrol, diseleksi, diresdibrusi oleh kekuasaan (Lubis, 2015). Dalam kasus ini Donald Trump sebagai “penguasa” sekaligus milyader mampu mengendalikan pengetahuan media melalui “kuasa” politik dan ekonomi.

Isu-isu dalam *post-truth* dipandang sebagai sebuah wacana kepentingan mengetahui dan menjelaskan realitas. Wacana yang diisukan dalam *post-truth* ini meliputi cara berfikir, cara mengetahui dan menyatakan sesuatu. Jaringan hubungan antara argumen, pola pikir dan pengetahuan yang disebut Foucault adanya berbagai perspektif, kepentingan dan kuasa yang berbeda dalam membentuk subjek. Oleh karena itu, terdapat beragam wacana yang membentuk pemikiran masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan filsafat sains (ilmu pengetahuan) yang harus mendasarkan argumennya pada sebuah epistemology logis dan dibuktikan secara ilmiah berkali-kali (diverifikasi). Selanjutnya kita mampu memberikan penjelasan (kausalitas) dan memberikan pemaparan secara jelas, sistematis, dengan pernyataan yang dapat dibuktikan (dijustificasi) berdasarkan pengalaman atau eksperimen.

KESIMPULAN

Kebenaran di era post factual memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Kebenaran adalah milik bagi seseorang atau pihak yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan. Pada masa orde baru, pemerintah memiliki legitimasi akan sebuah kebenaran, baik kebenaran akan sejarah ataupun kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi pada masa ini siapapun pihak yang memiliki pengetahuan, kekuatan atau media maka memiliki kemampuan dalam menentukan sebuah “kebenaran”. Hal ini semakin kompleks apabila dimasukkan unsur politik dalam perebutan kekuasaan. Hal ini lah yang menjadi gejala di media media daring atau media sosial di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini. Konsep in group dan out group dalam sosiaologis masih relevan, dimana in group adalah kelompok yang memiliki afiliasi atau pandangan sama dalam politik, madzab keagamaan dan lainnya. Disisi lain pihak yang tidak memiliki referensi politik dan keagamaan yang sama maka akan dianggap sebagai out group. Pada posisi seperti ini lah sikap kritis kedalam pandangan kedalam diri atau kelompok in group perlu dikaji ulang. Pada era ini juga lah, referensi yang menjadi pilihan dianggap sebagai pilihan yang “terbaik” dan pilihan yang lain adalah salah. Sebagai akademisi, sifat kritis kedalam diri terkadang mendaji sebuah hal yang lebih penting sebelum berusaha mengkritisi objek yang ada diluar diri kita.

REFERENSI

- BybeeC. 1999. Can democracy survive in the post-factual age? a return to the Lippmann-Dewey debate about the politics of news. *Journalism & Mass Communication Monographs*, 1(1). Cambridge Advanaced Learner’s Dictionary. 2003. Cambridge University Press.
- Chomsky N. 2015. How the world works. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Eriyanto, 2012, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, hlm.2
- Ghufron F. 2017. Menyikapi Era Defisit Kebenaran. Jakarta: Kompas [terbit tanggal 5 Januari 2017]
- Hunt A. & Wheeler B. 2017. Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU. BBC News[<http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>]. Diakses 19 Januari 2017.
- Latour B. 2004. Why has critique run out of steam? from matters of fact to matters of concern.*Critical Inquiry*, 30(2), 225-248.
- Laughlin R. 2004. Putting the record straight: a critique of ‘methodology choices and the construction of facts: some implications from the sociology of knowledge’. *Critical Perspectives on Accounting*, 15, 261–277.doi:10.1016/S1045-2354(03)00070-4.
- Longino H.E. 2002. The fate of knowledge. United State of America: Princeton University Press
- Lubis A.Y. 2015. Filsafat ilmu klasik dan kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers
- Lubis A.Y. 2016. Postmodernisme: teori dan metode. Jakarta: Rajawali Pers
- Ritzer G., Goodman D.J. 2011. Sociological Theory. New York: McGraw Hill
- Tunggal N. 2016. Produk Kebudayaan Inspirasi Pembangunan. Jakarta: Kompas [terbit tanggal 26 Desember 2016]

- Wright, Charles R.1988, *Sosiologi Komunikasi Masa*, Ed. Jalaluddin Rakhmat, Bandung, Remadja Karya & Littlejohn, Stephen W, (1996), *Theories of Human Communication*, Washington: Wadsworth Publishing Company.
- Zelizer B. 2004. When Facts, truth, and reality are god-terms: on journalism's uneasy place in cultural studies. *Communication and Critical/Cultural Studies*, 1 (1), 100-119. <https://doi.org/10.1080/1479142042000180953>

